

REORGANISASI KEKUASAAN LOKAL DI GUNUNG SAHILAN: DARI KEDAULATAN KERAJAAN KE PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA, 1905–1938

AMANAN

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning
email: amanan@unilak.ac.id

Abstract: *This study examines the reorganization of local authority in Gunung Sahilan from 1905 to 1938 as part of the transformation of political relations between Gunung Sahilan and the Dutch East Indies colonial government. The year 1905 marked a significant turning point, when the local rulers within the Goenoeng Sahilan en Onderhoorigheden signed a korte verklaring, thereby placing the territory under Dutch authority. This political realignment was subsequently followed by colonial efforts to restructure the form of government in the territory that had newly come under Dutch control. The Koloniaal Verslag of 1906 recorded the assignment of Captain H. Colijn on 13 May 1905 to investigate the form of government, the deployment of troops, the reorganization of the police, and the administration of taxation in the region. This study employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings demonstrate that the reorganization did not entail the immediate abolition of local authority. Rather, it proceeded through the restructuring and integration of indigenous authority into the colonial administrative framework. This process resulted in the institutionalization of zelfbestuur, Chalipahschap, and the office of penghulu, all of which had existed prior to the establishment of Dutch colonial control over the Kingdom of Gunung Sahilan. Under colonial rule, however, these institutions were reorganized and subjected to supervision by the controleur, who subsequently headed the Onderafdeeling Kampar Kiri. Thus, the reorganization of authority in Kampar Kiri constituted a process of transforming local political authority: the power of indigenous elites was not abolished, but rather re-institutionalized, constrained, and incorporated into the mechanisms of colonial governance.*

Keywords: *Gunung Sahilan, Kampar Kiri, reorganization of authority.*

Abstrak: Penelitian ini membahas reorganisasi kekuasaan lokal di Gunung Sahilan pada 1905–1938 sebagai bagian dari perubahan hubungan politik antara Gunung Sahilan dan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1905 menjadi titik penting ketika para kepala wilayah yang tercakup dalam *Goenoeng Sahilan en Onderhoorigheden* menandatangani *korte verklaring* yang menempatkan wilayah tersebut di bawah kekuasaan Belanda. Perubahan hubungan politik tersebut kemudian diikuti upaya pemerintah kolonial untuk menata bentuk pemerintahan di wilayah yang baru berada di bawah kekuasaannya. *Koloniaal Verslag* 1906 mencatat penugasan Kapten H. Colijn pada 13 Mei 1905 untuk meneliti bentuk pemerintahan, penempatan pasukan, reorganisasi kepolisian, dan pengaturan perpajakan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorganisasi tidak berlangsung melalui penghapusan langsung terhadap kekuasaan lokal, tetapi melalui proses penataan dan integrasi otoritas bumiputera ke dalam struktur pemerintahan kolonial. Proses tersebut kemudian menghadirkan *zelfbestuur*, *chalipahschap*, dan *penghulu* yang dimana beberapa dari peran-peran ini sebenarnya telah ada sebelum pemerintah Kolonial Belanda menguasai Kerajaan Gunung Sahilan. Tetapi, sistemnya kemudian di reorganisasi dan diawasi oleh *controleur* yang kemudian memimpin *Onderafdeeling Kampar Kiri*. Dengan demikian, reorganisasi kekuasaan di Kampar Kiri merupakan proses transformasi otoritas lokal: kekuasaan elite bumiputera tidak dihapus, tetapi dilembagakan kembali, dibatasi, dan diintegrasikan ke dalam mekanisme pemerintahan kolonial.

Kata kunci: Gunung Sahilan, Kampar Kiri, reorganisasi kekuasaan.

A. Pendahuluan

Meluasnya kekuasaan Hindia Belanda pada awal abad ke-20 membawa perubahan terhadap tatanan politik di wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan lokal. Perubahan kekuasaan pada masa ini tidak hanya berlangsung melalui pengambilalihan wilayah, tetapi juga melalui penataan kembali hubungan antara pemerintah Kolonial Belanda dan penguasa lokal. Di beberapa wilayah Kepulauan Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda justru membangun

kekuasaannya melalui penataan kembali hubungan dengan penguasa lokal, pengakuan terhadap kedudukan elite bumiputera, serta pembentukan struktur administratif yang memungkinkan pengawasan kolonial berjalan tanpa sepenuhnya menghilangkan pemerintahan tradisional. Pola semacam ini tampak dalam pembentukan pemerintahan *zelfbestuur*, ketika penguasa lokal tetap menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, tetapi kedudukannya ditempatkan dalam hubungan politik dan administratif yang berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, perubahan kekuasaan pada masa kolonial tidak selalu berbentuk pergantian penguasa secara langsung, melainkan dapat berlangsung melalui perubahan kewenangan, hubungan hierarkis, batas wilayah, dan mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan lokal.

Situasi tersebut turut terjadi di Kerajaan Gunung Sahilan pada awal abad ke-20. Kerajaan ini berada di wilayah Kampar Kiri. Sebelum dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda. Di kawasan ini berkembang Kerajaan Gunung Sahilan yang menjadi salah satu pusat kekuasaan politik di wilayah ini dengan struktur kekuasaan lokal tersendiri (Mayval et al., 2021). Struktur pemerintahan kerajaan tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan para pemimpin lokal dan sistem kenegarian yang memiliki fungsi politik, adat, dan sosial. Dengan demikian, ketika pemerintah Hindia Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Gunung Sahilan, mereka tidak memasuki suatu wilayah yang tidak memiliki struktur pemerintahan, tetapi berhadapan dengan tatanan politik lokal yang telah memiliki legitimasi dan perangkat kekuasaan sendiri.

Perubahan hubungan politik tersebut mulai terlihat secara jelas pada awal abad ke-20. Pada tahun 1905, para kepala wilayah yang tercakup dalam Goenoeng Sahilan en Onderhoorigheden menandatangani *korte verklaring*. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa wilayah Goenoeng Sahilan berada di bawah kekuasaan Belanda. Dengan demikian, 1905 tidak hanya merupakan tahun perubahan hubungan politik Gunung Sahilan dengan Belanda, tetapi juga menjadi titik awal bagi perubahan kedudukan kekuasaan lokal di wilayah tersebut. Perubahan tersebut segera diikuti oleh reorganisasi administratif. *Koloniaal Verslag* 1906 mencatat bahwa pada 13 Mei 1905 pemerintah memberikan tugas kepada Kapten H. Colijn untuk melakukan penelitian mengenai bentuk pemerintahan yang akan diterapkan di wilayah-wilayah yang baru saja tunduk kepada kekuasaan Belanda, termasuk Goenoeng Sahilan en Onderhoorigheden (Ministrie van Kolonien, 1906, p. 131). Pelaporan tersebut mencakup persoalan susunan pemerintahan, penempatan pasukan, reorganisasi kepolisian, serta pengaturan perpajakan. Salah satu hasilnya adalah pembentukan sementara *Onderafdeeling Kampar Kiri* yang terdiri dari wilayah Goenoeng Sahilan, Sibajang, Singingi, Logas, dan Oeloe Tesso ("Residentie Oostkust van Sumatera," 1906).

Kajian mengenai Gunung Sahilan selama ini telah memberikan dasar penting untuk memahami sejarah kerajaan dan sistem pemerintahannya. Salah satu kajian khusus mengenai Kerajaan Gunung Sahilan, misalnya, telah menggambarkan mengenai kondisi Kerajaan Gunung Sahilan dan pemimpinnya dari waktu ke waktu (Mayval et al., 2021). Kajian lain juga membahas struktur legitimasi dan keberadaan institusi kerajaan Gunung Sahilan sebagai lembaga politik dan adat (Bodok, 2024). Namun, kajian mengenai Gunung Sahilan cenderung menempatkan pemerintahan kerajaan sebagai objek utama, sedangkan proses perubahan hubungan kekuasaan antara penguasa lokal dan pemerintah kolonial pada saat pembentukan administrasi di wilayah Kampar Kiri setelah Kerajaan Gunung Sahilan jatuh ke bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda belum banyak dianalisis sebagai persoalan tersendiri. Padahal, dokumen kolonial menunjukkan bahwa periode 1905–1938 merupakan masa ketika pemerintah Belanda secara aktif menentukan kembali kedudukan masing-masing penguasa, wilayah kekuasaan, serta hubungan antara *landschap* dengan struktur administratif kolonial.

Celah tersebut penting untuk dikaji karena perubahan kekuasaan lokal tidak hanya berkaitan dengan perubahan status politik Kerajaan Gunung Sahilan. Proses tersebut juga menyangkut bagaimana pemerintah kolonial Belanda membentuk kategori administratif baru, bagaimana penguasa lokal mempertahankan kedudukannya, dan bagaimana hubungan antarpenguasa di wilayah tersebut setelah adanya reorganisasi pemerintahan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas proses reorganisasi kekuasaan lokal di Gunung Sahilan, Kampar Kiri pada 1905–1938. penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa kolonisasi ini merupakan proses negosiasi, subordinasi, dan reorganisasi kekuasaan yang secara bertahap mengubah struktur politik lokal tanpa serta-merta menghapus institusi pemerintahan tradisional.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan politik. Adapun tahap pertama yang dilakukan adalah heuristik. Pengumpulan sumber dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kondisi politik, pemerintahan, dan administrasi saat masih menjadi Kerajaan Gunung Sahilan hingga digabungkan ke dalam *Onderafdeeling* Kampar Kiri. Sumber primer yang digunakan adalah *Koloniaal Verslag*, *Memorie van Overgave*, dan koran sezaman. Peneliti juga menggunakan sumber skunder berupa buku, artikel, dan berita koran yang berkaitan dengan topik ini. Sumber-sumber tersebut kemudian melalui tahap kritik sumber, baik itu kritik eksternal maupun internal. Setelah itu, masuk ke dalam tahap interpretasi hingga disusun dalam hasil penelitian ilmiah yang merupakan tahap terakhir atau historiografi.

C. Pembahasan dan Analisa

Intervensi pemerintah kolonial Belanda di Gunung Sahilan memperlihatkan bentuk hubungan politik yang berbeda apabila dibandingkan dengan penerapan di wilayah lain, salah satunya *Atjeh-verklaring* di Aceh. *Atjeh-verklaring* memuat sejumlah ketentuan yang menegaskan posisi penguasa lokal di bawah supremasi pemerintah kolonial Belanda, antara lain pengakuan terhadap kekuasaan Belanda, larangan melakukan hubungan politik dengan kekuatan asing, serta kewajiban untuk menaati peraturan dan perintah pemerintah kolonial. Sementara itu, kontrak yang dibuat antara pemerintah kolonial dengan kepala-kepala Gunung Sahilan dan wilayah bawahannya tidak mencantumkan ketentuan kedua mengenai hubungan politik dengan kekuatan asing. Perbedaan tersebut diberitakan dalam *De Sumatra Post* pada 17 September 1906 melalui artikel ("Het Contract Met Goenoeng Sahilan," 1906). Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa penghilangan ketentuan kedua *Atjeh-verklaring* berkaitan dengan pandangan pemerintah kolonial bahwa Gunung Sahilan terletak jauh di pedalaman sehingga kecil kemungkinan wilayah tersebut melakukan hubungan politik dengan kekuatan asing. Namun, alasan tersebut kemudian dipersoalkan dalam sebuah artikel tahun 1906 ("De Goenoeng Sahilan-Contracten," 1906). *Het Vaderland* mempertanyakan batas antara *acte van onderwerping* (akta penundukan) dan *politieke overeenkomst* (perjanjian politik), sebab kontrak dengan penguasa bumiputera pada dasarnya juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian politik. Dengan demikian, kontrak Gunung Sahilan menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak menerapkan ketentuan *Atjeh-verklaring* secara seragam, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi politik dan geografis wilayah setempat. Meskipun demikian, keberadaan kontrak tersebut tetap menunjukkan upaya pemerintah kolonial untuk membangun hubungan politik yang menempatkan Gunung Sahilan ke dalam lingkup kekuasaan kolonial Belanda.

Setelah kelompok elite lokal menandatangani *korte verklaring*, pemerintah Kolonial Belanda mulai mengintervensi bentuk pemerintahan di wilayah ini. Upaya pertama dilakukan dengan menyiapkan bentuk pemerintahan baru melalui pembentukan *Onderafdeeling* Kampar Kiri. Pembentukan *onderafdeeling* ini memperlihatkan bahwa intervensi kolonial tidak berhenti pada pengakuan politik terhadap kekuasaan Belanda. Wilayah yang sebelumnya tersusun dalam satuan wilayah kerajaan mulai ditempatkan ke dalam satuan administratif kolonial. Hal ini secara jelas diberitakan dalam *De Sumatra Post* pada Mei 1906. Koran tersebut menyebut bahwa Goenoeng Sahilan, Sibajang, Singingi, Logas, dan Oeloe Tesso selanjutnya membentuk *Onderafdeeling* Kampar Kiri di bawah *Afdeeling* Bengkalis, serta diawasi seorang *controleur* ("Residentie Oostkust van Sumatera," 1906). Sumber sezaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan di wilayah Kampar Kiri berlangsung melalui proses administratif yang konkret: wilayah-wilayah dengan pemerintahan lokal ditempatkan ke dalam sebuah struktur kolonial baru dan diawasi oleh pejabat pemerintah Kolonial Belanda.

Pembentukan *Onderafdeeling* Kampar Kiri tersebut penting karena menunjukkan adanya perubahan dalam cara kekuasaan dijalankan. Sebelum intervensi kolonial, hubungan politik di wilayah ini bertumpu pada struktur kekuasaan lokal dan legitimasi penguasa serta pembesar adat. Setelah 1905, hubungan tersebut mulai berlapis. Di satu sisi, penguasa lokal masih dipertahankan; di sisi lain, pemerintah kolonial menempatkan pejabatnya sendiri untuk mengawasi pemerintahan dan kepentingan kolonial. Sumber pemerintah kolonial bahkan menyebut bahwa di daerah-daerah *landschap* atau

zelfbestuur dari pemerintahan sebelumnya (Kerajaan Gunung Sahilan) masih dibiarkan tetap berjalan, tetapi mengikuti ketentuan dan aturan dari pejabat/pengawas Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya, struktur kekuasaan Gunung Sahilan tidak sepenuhnya dihapus oleh pemerintah kolonial. Berdasarkan catatan A.J van Es, setelah *Onderafdeeling* Kampar Kiri terbentuk, Goenoeng Sahilan menjadi salah satu lanskap yang berada di *Onderafdeeling* Kampar Kiri. Selain itu, di Goenoeng Sahilan juga ditempatkan seorang *controleur* yang memimpin seluruh *Onderafdeeling* Kampar Kiri (“Bestuursindeeling van Bengkalis,” 1912). Merujuk pada berita yang dimuat dalam *De Locomotief* (8/9/1919), *controleur* yang memimpin *Onderafdeeling* Kampar Kiri bernama van Zadelhoff (“Weltevreden,” 1919). Kemudian, merujuk pada berita yang dimuat dalam *De Sumatra Post* (26/4/1928), *controleur* yang memimpin *Onderafdeeling* Kampar Kiri bernama N.Malkkes (“Besluiten En Benoemingen,” 1928). Mereka menjabat sebagai *Controelur* Kampar Kiri dan berkedudukan di Goenoeng Sahilan.

Onderafdeeling Kampar Kiri sendiri dibagi menjadi dua lanskap, yaitu Lanskap Goenoeng Sahilan dan Lanskap Singingi. Lanskap Goenoeng Sahilan dipimpin oleh seorang *zelfbestuur* (pemimpin wilayah dengan kekuasaan sendiri) yang bernama Tengko Soeloeng (Es, 1932). Tengko Soeloeng ini dikukuhkan sebagai *zelfbestuurder* sejak tanggal 15 Mei 1930. Merujuk pada (Mayval et al., 2021) yang mengutip silsilah keturunan raja Kerajaan Gunung Sahilan, Tengko Soeloeng merupakan raja kesembilan yang menjabat pada tahun 1930-1941. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan elite bumiputera masih tetap dipertahankan meskipun strukturnya telah dimodifikasi oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda tidak menggantikan kedudukan penguasa bumiputera dengan pejabat Eropa secara langsung, tetapi justru menempatkan penguasa lokal ke dalam kedudukan yang diakui melalui sistem *zelfbestuur*. Pada tahun yang sama saat Tengko Soeloeng dikukuhkan, *controleur* Kampar Kiri tidak lagi ditempatkan di Goenoeng Sahilan karena kantornya dipindahkan ke Pakan Baroe.

Di bawah kepemimpinan dipimpin *zelfbestuurder*, wilayah lanskap Goenoeng Sahilan dibagi ke dalam beberapa *chalipahschap*. Ada 5 *chalipahschap*, yaitu Kampar Kiri, Koentoe, Oedjoeng Boekit, Batoe Sanggan, dan Loodai. Pembagian ini sekaligus membedakan antara Lanskap Goenoeng Sahilan dan *Onderafdeeling* Kampar Kiri. Lanskap menunjukkan wilayah pemerintahan bumiputera yang berada di bawah pimpinan *zelfbestuur*, sedangkan *onderafdeeling* merupakan struktur administratif kolonial yang berada di bawah pejabat Belanda, yaitu *controleur*. Tetapi, keduanya beroperasi dalam ruang pemerintahan yang sama dan saling berhubungan (Es, 1932).

Kelima *chalipahschap* tersebut dipimpin oleh seorang *chalipah*. *Chalipah* ditunjuk oleh *zelfbestuurder* dengan mempertimbangkan penghelo yang berdsangkutan, para tetua suku, serta hasil konsultasi dengan *controleur*. Mereka juga harus bisa membaca dan menulis agar bisa memimpin *chalipahschap*. Setiap *chalipahschap* terbagi menjadi beberapa *negori*. Adapun satuan territorial yang paling rendah dalam suatu *negori* adalah *soekoe-soekoe* (suku-suku). Kemudian, di kepala suatu suku, terdapat seorang *penghelo* (penghulu) yang dipilih melalui musyawarah dengan para penghulu lainnya dalam *negori*. Dengan demikian, tampak bahwa pemerintah Kolonial Belanda tidak sekedar mempertahankan “raja” sebagai simbol kekuasaan lokal, tetapi juga mengintegrasikan berbagai tingkatan kepemimpinan lokal yang telah ada sebelumnya ke dalam struktur pemerintahan yang telah diatur atau diorganisasi sedemikian rupa. Reorganisasi ini menciptakan hubungan baru antara struktur elite lokal yang telah ada sebelumnya dengan struktur pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda setelah *korte verklaring* (Dorenbosch, 1938).

Kedudukan *zelfbestuur* (raja), *chalipah*, *penghelo* menunjukkan distribusi kekuasaan yang teratur dalam struktur pemerintahan lanskap. Sejak diakui sebagai *zelfbestuurder*, tercatat bahwa kekuasaan faktual dan prestise dari raja Gunung Sahilan meningkat secara signifikan. Ia menjadi lambang atau simbol kekuasaan sekaligus instansi tertinggi dalam penyelesaian sengketa di wilayah ini, termasuk apabila masalah di *chalipascap* tidak bisa diselesaikan oleh *chalipah*. Berdasarkan catatan Dorenbosch, berikut nama-nama dan gelar *chalipah* yang menjabat pada tahun 1938 :

Tabel 1. Nama-Nama Chalipah di Lanskap Goenoeng Sahilan Tahun 1938

<i>Chalipahschap</i>	Nama pribadi <i>Chalipah</i>	Gelar <i>Chalipah</i>	Jumlah negeri
Kampar Kiri	Sapar	Datoek Besar	11
Koentoe	Moh. Ali	Datoek Bendahara	3
Oedjoeng Boekit	Moeh. Ali	Datoek Bendahara	3

Batoe Sanggan	Taaral	Datoek Gedang	6
Loedai	Mat Joedin	Datoek Madjo Besar	3

Sumber : (Dorenbosch, 1938)

Selain mencatat nama *chalipah* yang menjabat, Dorenbosch juga mengungkapkan bahwa pada tahun 1938, nama Kampar Kiri mulai sering digunakan untuk menyebut *zelfbestuur* Goenoeng Sahilan. Apabila sebelumnya wilayah *zelfbestuur* ini disebut dengan Goenoeng Sahilan, sejak tahun 1938, sebutannya mulai digantikan dengan *zelfbestuur Kampar Kiri*. Kemudian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sejak tahun 1930, tidak ada lagi *controleur* yang berkedudukan di Goenoeng Sahilan karena kantornya dipindahkan ke Pekanbaru. Sejak itu, kantor lamanya hanya digunakan sebagai *pasanggrahan* apabila ia sedang berada di Goenoeng Sahilan. Kendati demikian, keberadaan Gunung Sahilan tetap penting dalam struktur politik lokal.

Rangkaian peristiwa 1905–1938 tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kekuasaan di Kampar Kiri berlangsung melalui setidaknya tiga proses yang saling berkaitan. Pertama, terjadi perubahan hubungan politik melalui *korte verklaring* yang menempatkan kerajaan dan *landschap* lokal di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Kedua, terjadi reorganisasi administratif melalui pembentukan *Onderafdeeling Kampar Kiri* dan penempatan *controleur* sebagai representasi pemerintah kolonial. Ketiga, terjadi penataan kembali kedudukan para penguasa lokal melalui pengakuan dan pengukuhan mereka sebagai *bestuurder* oleh pemerintah kolonial. Perubahan tersebut juga disertai dengan redefinisi batas dan hubungan antara masing-masing *landschap*. Oleh sebab itu, kolonisasi Kampar Kiri dapat dipahami sebagai proses reorganisasi struktur Kolonial Belanda.

D. Penutup

Perubahan hubungan politik yang terjadi antara Kerajaan Gunung Sahilan dan pemerintah kolonial Belanda pada 1905 menjadi titik awal bagi reorganisasi kekuasaan di wilayah ini. Penandatanganan *korte verklaring* oleh para kepala wilayah *Goenoeng Sahilan en Onderhoorigheden* tidak hanya menunjukkan perubahan status politik wilayah tersebut, tetapi juga membuka ruang bagi pemerintah kolonial untuk melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan yang telah ada. Penugasan Kapten H. Colijn pada Mei 1905 memperlihatkan bahwa setelah memperoleh pengakuan politik atas wilayah tersebut, pemerintah kolonial segera memikirkan bentuk pemerintahan yang sesuai bagi daerah yang baru berada di bawah kekuasaannya. Persoalan pemerintahan, kepolisian, penempatan pasukan, dan perpajakan menunjukkan bahwa perubahan tersebut menyentuh berbagai aspek penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, 1905 dapat dipandang sebagai titik awal reorganisasi, bukan sebagai titik berakhirnya pemerintahan lokal.

Namun, reorganisasi tersebut tidak menghasilkan penghapusan terhadap struktur kekuasaan bumiputera. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pemerintah kolonial justru mempertahankan dan menata kembali institusi lokal agar dapat ditempatkan dalam struktur pemerintahan yang baru. Hal tersebut terlihat semakin jelas dalam perkembangan *Landschap* dan pejabat lokalnya. Raja Gunung Sahilan kemudian memperoleh kedudukan sebagai *Zelfbestuurder*, sementara struktur di bawahnya terdiri atas *Chalipahschap*, *negeri*, *soekoe*, dan *penghulu*. Dengan demikian, otoritas yang sebelumnya memperoleh legitimasi dari hubungan politik dan adat lokal tidak sepenuhnya kehilangan kedudukannya. Akan tetapi, legitimasi tersebut mengalami perubahan fungsi karena mulai bekerja melalui struktur yang diakui dan diawasi pemerintah kolonial. Dengan demikian, reorganisasi kekuasaan di Kampar Kiri selama 1905–1938 sebaiknya tidak dipahami sebagai pergantian sederhana dari pemerintahan kerajaan menjadi pemerintahan kolonial. Proses tersebut merupakan transformasi bertahap yang dimulai dari perubahan hubungan politik pada 1905, dilanjutkan dengan penataan administrasi kolonial, kemudian pelembagaan otoritas lokal. Pemerintah kolonial tidak menghapus kekuasaan lokal, tetapi mengubah cara kekuasaan tersebut bekerja, dan melakukan pengawasan dalam sistem kolonial. Pada saat yang sama, elite lokal mempertahankan kedudukan mereka dengan beradaptasi terhadap struktur baru tersebut.

Daftar Pustaka

- Besluiten en Benoemingen. (1928, April 26). *De Sumatra Post*.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010360216:mpeg21:a0096>.
- Bestuursindeeling van Bengkalis. (1912, June 26). *De Sumatra Post*.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010323942:mpeg21:a0089>.
- Bodok. (2024). Sejarah Kerajaan Gunung Sahilan, Jejak Melayu-Islam di Batang Kampar Kiri. *Pagar Alam Pos*. <https://pagaralampos.disway.id/sejarah-dan-misteri/read/691598/sejarah-kerajaan-gunung-sahilan-jejak-melayu-islam-di-batang-kampar-kiri>.
- De Goenoeng Sahilan-Contracten . (1906, September 20). *De Sumatra Post*.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010322604:mpeg21:a0053>.
- Dorenbosch, H. J. G. (1938). *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Kampar Kiri*.
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.39/invnr/@871/file/NL-HaNA_2.10.39_871_0001.
- Es, A. J. van. (1932). *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Kampar Kiri*.
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.39/invnr/@858/file/NL-HaNA_2.10.39_858_0001.
- Het Contract Met Goenoeng Sahilan . (1906, September 17). *De Sumatra Post*.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010322601:mpeg21:a0055>.
- Mayval, S., Yuliantoro, & Fikri, A. (2021). Kilas Balik Kerajaan Gunung Sahilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 439–444.
- Ministrie van Kolonien. (1906). *Koloniaal Verslag 1906*.
- Residentie Oostkust van Sumatera. (1906, May 22). *De Sumatra Post*.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010322201:mpeg21:a0058>.
- Weltevreden . (1919, September 8). *De Locomotief*.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001669009:mpeg21:a00100>.